

PEMIKIRAN MOHAMMAD NATSIR TENTANG IDEOLOGISASI ISLAM DI INDONESIA TAHUN 1949-1959

Septian Prasetyo

11040284220

Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Surabaya
septianprasetyo66@gmail.com

Drs. Sumarno, M. Hum

Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Surabaya

Abstrak

Pada masa demokrasi liberal, di Indonesia terjadi perang ideologi antar partai dan golongan. Golongan-golongan pada masa itu diwakili tiga partai besar yaitu, Masyumi (Islam), PNI (Nasionalis), dan PKI (Komunis). Perang ideologi itu dilatar belakangi perdebatan ideologis tentang dasar negara Indonesia. Golongan Islam mengusung ideologi Islam dan golongan nasionalis-komunis mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara. Dalam polemik itu muncul Mohammad Natsir dari partai Masyumi yang menawarkan pemikirannya tentang ideologisasi Islam. Natsir memiliki pemikiran yang memadukan konsep Islam dengan konsep barat dan merumuskan konsep baru yang disebut "Theistik Demokrasi". Untuk mencapai tujuannya, Natsir perlu menjalankan proses ideologisasi Islam dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: Apa latar belakang pemikiran ideologi Islam Mohammad Natsir? Bagaimana pemikiran Mohammad Natsir tentang ideologisasi Islam di Indonesia pada tahun 1949-1959?

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah. Langkah pertama adalah tahap heuristik, yaitu mengumpulkan sumber data sejamin berupa arsip notulen sidang Tentang Dasar Negara Dalam Konstituante Tahun 1957-1959, surat dukungan terhadap dasar negara Islam dari PNI, NU, dan Masyumi, koran sejamin dan sumber lain yang sejamin. Selanjutnya dilakukan kritik dengan cara membaca sumber arsip dan mengelompokkannya. Tahap interpretasi dilakukan dengan menghubungkan antar fakta dan disusun historiografi dengan judul Pemikiran Mohammad Natsir tentang Ideologisasi Islam di Indonesia Tahun 1949-1959.

Latar belakang pemikiran ideologi Islam Mohammad Natsir dimulai dari kehidupan di lingkungan masyarakat Islam Minang, pendidikan dasar di sekolah Islam hingga memasuki dunia politik nasional dan ideologi Islamnya semakin kuat dalam Masyumi. Berlandaskan ideologi Islamnya itu Natsir merumuskan konsep ideologisasi Islam di Indonesia. Natsir merumuskan nilai-nilai Islam untuk ditanamkan dalam masyarakat Indonesia dalam nilai Tauhid, Persaudaraan, Persamaan dan Ijtihad. Untuk menjalankan konsepnya, Natsir mengambil jalan legal formal yaitu melalui tulisan, pidato dan sidang konstituante. Pergerakannya berakhir setelah keluarnya dekrit presiden 5 Juli 1959.

Kata kunci: *Mohammad Natsir, Islam, Ideologisasi*

Abstract

At the time of liberal democracy, in Indonesia occurred ideological war between the parties and groups. Factions at that time represented the three major parties, namely, Masjumi (Islam), PNI (Nationalist), and PKI (Communist). The ideological war against the background of the debate about the ideologic basis of the Indonesian state. Islamic group carrying Islamic ideology and nationalist-communist maintain Pancasila as the state. In the polemic it appears Mohammad Natsir of Masjumi that offers pemikirannya about Islamic ideology. Natsir have thought that combines the concept of Islam with western concepts and formulate a new concept called "theistic Democracy". To achieve its objectives, Natsir need to run the Islamic ideology in the life of Indonesian society. The problem in this research is: What is the rationale of Islamic ideology Mohammad Natsir? How Mohammad Natsir thinking about ideologisasi Islam in Indonesia in 1949-1959?

The method used in this study is the historical method. The first step is the stage heuristic, which collects data source in the form of archive contemporaneous minutes of the hearing About the State of the Constituent Year In 1957-1959, the basic letter of support for the Islamic state of PNI, NU, and Masjumi, contemporary newspapers and other contemporary sources. Furthermore, the criticism by reading the source archive and breaks. Stage interpretation is done by connecting between the facts and drafted historiography with the title Thought Mohammad Natsir About Ideologization of Islam in Indonesia At 1949-1959.

Rationale ideology of Islam Mohammad Natsir began of his life in the Islamic community Minang, basic education in Islamic schools to enter the world of national politics and his ideology of Islam is stronger in Masjumi. Based on the Islamic ideology Natsir formulate the concept of Islamic ideology in Indonesia. Natsir formulate Islamic values to be embedded in Indonesian society in the value of Tawheed, Fraternity, Equality and Ijtihad. To run the concept, Natsir took formal and legal way is through writing, speech and constituent assembly. Movement ended after the release of July 5, 1959 presidential decree.

Keywords: *Mohammad Natsir, Islam, Ideologization*

PENDAHULUAN

Sejak berlangsungnya masa pergerakan nasional, di Indonesia terjadi perang ideologi yang terus berlanjut hingga penetapan ideologi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Bahkan setelah Pancasila ditetapkan secara sah sebagai dasar negara masih ada pula upaya-upaya secara diplomasi, loby-loby politik, maupun cara yang radikal untuk menggesernya dari posisi sebagai *fundamental norm* yang dianut dan dijalankan masyarakat Indonesia. Banyak pandangan ideologi yang berusaha diterapkan di Indonesia untuk menggantikan Pancasila sebagai dasar negara seperti Komunis, Nasionalis maupun Ideologi Islam.

Berkembangnya ideologi-ideologi itu diikuti munculnya tokoh-tokoh nasional yang menjadi aktor dalam percaturan politik di Indonesia. Sebagai salah satu negarawan dengan ideologi Islam, Mohammad Natsir memiliki peran yang menonjol dalam percaturan politik di Indonesia. Natsir tidak hanya dikenal sebagai tokoh Masyumi dan mantan Perdana Menteri, namun juga dikenal sebagai pemimpin Islam yang paling tangguh dan piawai dengan pandangan-pandangannya yang berkualitas seorang ulama, negarawan dan sekaligus berbotot intelektual.¹

Tulisan ini memfokuskan kajian penelitian pada pemikiran Mohammad Natsir tentang agama, khususnya agama Islam sebagai ideologi serta pandangannya tentang ideologisasi Islam untuk mencapai gagasannya. Selanjutnya Natsir mengkaitkan aspek dan nilai-nilai agama Islam dalam konteks bernegara melalui pendekatan legal formal sebagai jalan yang ditempuhnya dalam proses ideologisasi, sehingga dapat dikatakan sebagai pemikiran politik.

Hubungan agama dan negara menjadi kajian yang sangat menarik, sejak dahulunya banyak pertarungan pemikiran antara para pemikir yang mengemukakan bahwa agama harus digabungkan dalam keseluruhan aktivitas kehidupan dan pemikir-pemikir yang mengemukakan pemisahan antara agama dan kehidupan politik. Islam jelas berpengaruh dalam pemikiran dan perjuangan Natsir. Bagaimanakah pandangan Natsir tentang agama sebagai ideologi? Apakah dengan menjadikan agama sebagai ideologi Natsir berusaha mendirikan negara teokrasi? Berhasilkah Natsir dalam perjuangannya? Pertanyaan-pertanyaan di ataslah yang menjadi latar belakang penulis sehingga menjadikan

tokoh Natsir sebagai kajian yang sangat pantas dan menarik untuk diteliti. Alasan ini pula yang mendorong penulis, untuk menjawab pertanyaan seputar pemikiran Natsir terhadap persoalan agama, ideologi, dan negara sekaligus juga berusaha untuk memperluas pemikiran-pemikiran positif dari tokoh yang piawai dengan ke-Islaman dan ke-Indonesiaan ini.

Batasan Masalah

Aspek temporal dalam tulisan ini dibatasi pada perjuangan Natsir antara tahun 1949-1959, yaitu masa kiprah Natsir berada pada partai Islam Masyumi. Periode ini dinilai merupakan masa Natsir memiliki *power* yang cukup untuk berada pada jalur perjuangan baik pro pemerintah maupun kontra pemerintah. Dimulai tahun 1949 karena pada tahun ini Natsir mulai menjabat sebagai ketua umum Masyumi yang merupakan partai terbesar dalam parlemen. Pembatasan pembahasan pada tahun 1959 karena pada tahun ini tepatnya pada 5 Juli 1959 presiden Soekarno dengan sokongan penuh pihak militer mengeluarkan dekrit untuk kembali ke UUD 1945 dan sekaligus membubarkan Majelis Konstituante. Pembubaran konstituante ditetapkan sebagai momentum berakhirnya perjuangan natsir melalui jalan legal formal dalam menyampaikan gagasannya tentang ideologi Islam.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan, yaitu:

1. Apa latar belakang pemikiran ideologi Islam Mohammad Natsir?
2. Bagaimana pemikiran Mohammad Natsir tentang ideologisasi Islam di Indonesia pada tahun 1949-1959?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan latar belakang pemikiran ideologi Mohammad Natsir tentang Islam
2. Untuk menjelaskan pemikiran yang dikemukakan oleh Mohammad Natsir tentang ideologisasi Islam di Indonesia secara konseptual dalam menjawab tantangan zaman

Manfaat Penelitian

¹ Abdul Munir Mulkan, 1996. *Ideologisasi Gerakan Dakwah Episod Kehidupan M.Natsir dan Azhar Basyir*. Yogyakarta: Sipsess., Hlm. 4.

1. Hasil penelitian ini nantinya diharapkan akan menambah dan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya ilmu sejarah pemikiran, sejarah politik dan ilmu sejarah nasional.
2. Hasil penelitian ini nantinya diharapkan akan dapat menjadi bahan rujukan dan kajian sehingga dapat menambah informasi serta pengetahuan untuk penelitian sejenis selanjutnya.
3. Hasil penelitian ini nantinya diharapkan akan dapat memberikan gambaran tentang situasi politik Indonesia pada masa-masa awal kemerdekaan Indonesia.
4. Hasil penelitian ini nantinya diharapkan akan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap perjuangan tokoh nasional Mohammad Natsir dan pemikirannya untuk Indonesia.

Tinjauan Pustaka

Sebagai seorang negarawan, agamawan, serta intelektual muslim, tokoh Mohammad Natsir telah banyak menjadi sorotan para penulis terutama yang berkaitan dengan pemikiran Islam dan bangsa Indonesia. Tulisan-tulisan ini dalam bentuk buku, artikel maupun penelitian. Tulisan berupa buku seperti *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942* tulisan Deliar Noer. Dalam buku ini Deliar Noer menjelaskan tentang Natsir sebagai anggota Persis, karirnya dalam politik dan partai Islam di Indonesia, serta polemiknya dengan Soekarno.² Isi buku ini membahas tentang perkembangan pergerakan Islam menjelang kemerdekaan RI. Buku *Wajah-wajah nasional* tulisan dari Solichin Salam membahas biografi beberapa tokoh nasional yang berperan dalam sejarah bangsa Indonesia, salah satu bab dalam buku ini memuat tulisan terkait biografi Mohammad Natsir.³ Buku berjudul *Soekarno Versus Natsir Kemenangan Barisan megawati Reinkarnasi Nasionalis Sekuler* yang ditulis Amad Suhelmi membahas polemik agama dan negara antara Soekarno dan Natsir.⁴ Buku ini membahas perdebatan ideologis antara golongan nasionalis yang diwakili Soekarno dengan golongan Islam yang diwakili Mohammad Natsir tentang agama dan negara.

METODE

Penelitian dan penulisan suatu sejarah dilakukan secara sistematis menggunakan metode penelitian sejarah. Untuk dapat mengungkapkan permasalahan yang diteliti penulis menggunakan metode penelitian sejarah.⁵ Ada empat tahapan di dalam Metode Penelitian Sejarah, yaitu: (1) *Heuristik*, Penelitian sejarah pada tahap

heuristik peneliti melakukan pengumpulan sumber. Pengumpulan sumber yang berkaitan dengan pemikiran politik Mohammad Natsir. Pencarian dan pengumpulan sumber dilakukan untuk mencari sumber utama dan sumber pendukung. Pencarian sumber utama dilakukan khususnya dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Beberapa sumber utama yang ditemukan yaitu “*Tentang Dasar Negara Republik Indonesia dalam Konstituante*” jilid I yang merupakan notulen sidang konstituante tahun 1957 yang membahas Islam sebagai dasar negara. Meskipun telah ditulis ulang, namun tidak mengurangi validitasnya sebagai sumber utama. Ditemukan pula surat dukungan terhadap dasar negara Islam yang ditujukan kepada PNI, Masyumi dan NU dari Gerakan Pemuda Anshor. Penelusuran sumber di Perpustakaan Nasional menghasilkan sumber utama lain yang ditemukan yaitu koran sezaman. Koran *Harian Indonesia Raya* tahun 1957 yang memuat berita terkait pelaksanaan sidang Konstituante. Koran *Harian Indonesia Raya* tahun 1959 yang memuat berita keluarnya Dekrit Presiden tahun 1959. Selain itu ditemukan pula sumber buku terkait pemikiran Natsir seperti *Capita Selecta jilid I* serta *Capita Selecta jilid II* sebagai buku yang berisi pemikiran-pemikiran serta pidato-pidato Mohammad Natsir. (2) *Kritik Sumber*, Pada tahap kritik sumber, penulis melakukan kritik dan verifikasi dengan tujuan untuk menguji validitas sumber - sumber yang telah diperoleh dalam upaya penulisan sejarah terkait pemikiran dan perjuangan tokoh Mohammad Natsir. Penulis melakukan kritik intern terhadap sumber-sumber yang ditemukan. Fokus dari kritik intern terutama berusaha membuktikan bahwa kesaksian yang diberikan oleh suatu sumber memang dapat dipercaya.⁶ Setelah dilakukan kritik sumber ini penulis menemukan isi sumber-sumber yang ditetapkan sebagai fakta. (3) *Interpretasi*, Interpretasi dimaksudkan sebagai upaya tercapainya pemahaman yang benar terhadap fakta, data dan gejala. Bertujuan untuk melakukan sintesis atas sejumlah fakta yang diperoleh dari sumber-sumber sejarah dan bersama-sama dengan teori disusunlah fakta itu dalam interpretasi yang menyeluruh secara kronologis. Pada tahap ini penulis melakukan proses penafsiran fakta-fakta yang tidak terlepas satu sama lain untuk dirangkai sehingga menjadi satu kesatuan tulisan yang harmonis, utuh dan logis.. (4) *Historiografi*, Historiografi yaitu tahap penulisan (*graphein*-tulisan) sejarah. Pada tahap ini rangkaian fakta yang telah ditafsirkan disajikan secara tertulis sebagaikisah atau ceritera sejarah.⁷ Tahap ini merupakan bagian terpenting dari proses penulisan sejarah dimana penulis melakukan penulisan sejarah berdasarkan kerangka berpikir dan fakta yang sebelumnya dipersiapkan. Berbagai fakta yang terkumpul dirangkai kronologis dan sistematis sehingga menjadi tulisan sejarah yang metodologis dan sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

⁶ *Ibid.* Hlm. 29

⁷ Nugroho Notosusanto, 1978. *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer*. Jakarta: Idayu Press. Hlm. 6

² Deliar Noer, 1996. *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*. Jakarta: LP3ES. Hlm. 308

³ Solichin Salam. 1990. *Wajah-wajah Nasional*. Jakarta : Pusat Studi Dan Penelitian Islam. Hlm. 131-134

⁴ Ahmad Suhelmi. 1999. *Soekarno Versus Natsir Kemenangan Barisan Megawati Reinkarnasi Nasionalis Sekuler*. Jakarta: Darul Falah. Hlm. 48

⁵ Aminuddin Kasdi .2005. *Memahami Sejarah* . Surabaya : Unesa University Press. Hlm. 10 -11

Mohammad Natsir lahir di Jembatan Berukir, Alahan Panjang, Kabupaten Solok, Sumatra Barat, pada tanggal 17 Jumadil Akhir 1326 H, bertepatan dengan 17 Juli 1908 M,⁸ kawasan yang terkenal dengan kultur agama Islam yang kental dalam kehidupan sosialnya. Ibunya bernama Khadijah, sedangkan ayahnya bernama Mohammad Idris dengan gelar Sutan Saripado, seorang pegawai rendah yang pernah menjadi juru tulis pada kantor kontroler di Maninjau. Ia memiliki tiga orang saudara kandung, masing-masing bernama Yukinan, Rubiah dan Yohanusun.⁹ Adapun gelar yang diberikan kepada Natsir adalah Datok Sinaro Panjang, gelar pusaka diberikan kepada Natsir setelah menikah dengan Nurnahar pada tanggal 20 Oktober 1934. Gelar tersebut merupakan gelar adat yang diberikan kepada seseorang setelah menikah dan berlaku secara turun temurun.¹⁰

Natsir melewati masa-masa sosialisasi keagamaan dan intelektualnya yang pertama ketika dia mulai menempuh pendidikan dasar di sekolah milik Belanda dan mempelajari agama dengan tekun kepada beberapa orang tokoh alim ulama pembaharu.¹¹ Keinginannya tidak terwujud dikarenakan status pekerjaan ayahnya yang tidak memiliki kedudukan khusus, akhirnya dia melanjutkan sekolahnya ke HIS Adabiyah di Padang.¹² Pendidikan Natsir di Padang belum sampai tamat dikarenakan ayahnya memindahkannya ke HIS Solok. Di sekolah inilah Natsir mulai belajar bahasa Arab dan Fiqih kepada tuanku Mudo Amin, seorang pengikut dan kawan Haji Rasul, Natsir menamatkan pendidikan HIS dan Madrasah Diniyah di Solok, ia juga mengikuti pelajaran secara teratur yang dibimbing oleh Haji Abdullah Ahmad di Padang.¹³

Setelah terselesaikannya pendidikan di Solok pada tahun 1923-1927 Natsir mendapat beasiswa untuk sekolah di Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO) Padang. Disini Natsir aktif dalam kegiatan yang bersifat ekstrakurikuler, tapi fokus utamanya kegiatan kurikuler MULO, dia masuk anggota Pandu Nationale Islamistizche Paviderij sejenis pramuka sekarang dan Jong Islamiten Bond (JIB) Padang yang diketuai oleh Sanusi Pane.¹⁴

Latar belakang kehidupan yang kental dengan Islam serta keterlibatannya dalam kehidupan organisasi menjadi dasar Natsir mulai tertarik pada pergerakan Islam dan mulai belajar politik di perkumpulan JIB sebuah organisasi pemuda Islam. Motivasinya masuk JIB, karena ia prihatin terhadap besarnya pengaruh Barat di kalangan

pelajar-pelajar muslim, yang terlihat dari cara berpikir dan bergaul ala Barat, mereka bangga mengidentifikasi diri dengan orang Belanda.¹⁵

Keinginan Natsir untuk belajar agama semakin menguat karena interaksinya dengan para tokoh nasional hingga resmi menjadi anggota JIB cabang Bandung. Keseriusannya di JIB membuahkan hasil sebuah kepercayaan kawan-kawannya dengan mengangkat Natsir sebagai ketua periode 1928-1932,¹⁶ dari organisasi inilah Natsir total aktif dan total mengasah kemampuan politiknya. Anggota-anggota JIB adalah pelajar-pelajar Bumi Putera yang bersekolah di sekolah Belanda, organisasi ini mendapat pengaruh intelektual yang cukup mendalam dari Haji Agus Salim, seorang tokoh intelektual muslim Indonesia dan pemimpin Sarekat Islam.¹⁷

Natsir mulai melibatkan diri dalam aktivitas politik ketika ia mendaftarkan diri menjadi anggota Partai Islam Indonesia (PII) dan terpilih menjadi ketua cabang partai itu di Bandung pada awal tahun 1940. Ia aktif pula dalam kepemimpinan Majelis al-Islam A'la Indonesia (MAI),¹⁸ suatu badan federasi organisasi sosial dan politik Islam yang didirikan menjelang akhir penjajahan Belanda di Indonesia.

Di masa pendudukan Jepang Natsir aktif dalam kepemimpinan Majelis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi) yang dibentuk atas inisiatif pemerintah militer Jepang. Setelah kekalahan Jepang, Masyumi baru tanpa campur tangan Jepang secara resmi berdiri pada tanggal 17 November 1945 melalui Kongres Nasional Umat Islam di Yogyakarta yang diketuai Sukiman, dulunya orang-orang didalamnya aktif di Majelis Islam A'la Indonesia.¹⁹

Natsir termasuk pelopor terbentuknya Masyumi, bahkan dia juga menjabat sebagai ketua partai Masyumi dari tahun 1950-1958.²⁰ Keterlibatan Natsir di partai Masyumi inilah yang mengantarkannya sebagai politisi sekaligus seorang negarawan. Natsir mulai kiprahnya setelah Natsir dipercaya menjadi anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP),²¹ dalam kabinet Sjahrir ia pernah menjabat sebagai menteri penerangan RI.²²

Masyumi terbentuk didalamnya terdiri dari beberapa organisasi Islam seperti Muhammadiyah, Persis, Nahdhatul Ulama, Pergerakan Tarbiyah Islamiyah dan Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII). Natsir terlibat di Masyumi dari awal berdirinya dan tahun 1950 sampai tahun 1958 dia terpilih sebagai orang nomor satu di partai Masyumi.²³ Masyumi merupakan kekuatan politik yang

⁸ Abuddin Nata, 2005. *Tokoh-tokoh Pembaruan Pendidikan di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hlm. 73

⁹ *Ibid*

¹⁰ Yusuf A. Puar, 1978. *M. Natsir 70 Tahun Kenang – Kenangan Kehidupan dan Perjuangan*. Jakarta : Antara. Hlm. 4

¹¹ Yusril Ihza Mahendra, 1994. "Modernisme Islam dan Demokrasi: Pandangan Politik Mohammad Natsir", dalam *Islamika*, No.3, Januari-Maret 1994. Hlm. 64

¹² Luthh, Thohir, 1999. *M. Natsir Dakwah dan Pemikirannya*. Jakarta: Gema Insan Press Mulkan, Abdul Munir, 1996. *Ideologisasi Gerakan Dakwah Episod Kehidupan M.Natsir dan Azhar Basyir*. Yogyakarta: Sypress Hlm. 27

¹³ Deliar Noer, 1996. *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*. Jakarta: LP3ES. Hlm. 100

¹⁴ Thohir Luth, *Op cit*. Hlm. 22-23

¹⁵ Ahmad Suhelmi, 1999. *Soekarno Versus Natsir Kemenangan Barisan Megawati Reinkarnasi Nasionalis Sekuler*. Jakarta : Darul Falah. Hlm. 24

¹⁶ Yusril Ihza Mahendra, *Op cit*. Hlm. 65

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ Ahmad Syafi'i Ma'arif, 1985. *Studi Tentang Percaturan dalam Konstituante Islam dan Masalah Kenegaraan*. Jakarta : LP2ES. Hlm. 96

¹⁹ Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Op cit*. Hlm. 96

²⁰ Iskandar Z dkk, 2004. *Dinamika Ilmu Jurnal Kependidikan*. Samarinda: STAIN Samarinda. Hlm. 98

²¹ Mahfud M.D, Moh. *Op cit*. Hlm 46

²² Solichin Salam, 1990. *Wajah-wajah Nasional*. Jakarta: Pusat Studi Dan Penelitian Islam. Hlm. 132

²³ *Ibid*

sangat kuat dalam pemerintahan. Hal ini tidak lepas dari peran Mohammad Natsir dalam menyampaikan gagasannya berupa sebuah mosi dalam sidang parlemen. Mosi yang terkenal sebagai Mosi Integral Natsir ini memberikan angin segar bagi pemerintah untuk menyelesaikan persoalan bangsa yang sedang terjadi. Mosi integral yang diajukan Natsir dalam menyelamatkan Republik Indonesia dengan jalan konstitusi menjadikan debut politik amat cemerlang baginya. Berikut adalah akhir dari bunyi pidato natsir di parlemen atau yang terkenal dengan Mosi Integral Natsir:

Memperhatikan :

Suara2 rakjat dari berbagai daerah, dan mosi2 Dewan Perwakilan Rakyat sebagai saluran dari suara2 rakjat itu, untuk melebur daerah2 buatan Belanda dan menggabungkannya kedalam Republik Indonesia. Kompak untuk menampung segala akibat2 jang tumbuh karenaja, dan persiapan2 untuk itu harus diatur begitu rupa, dan mendjadi program politik dari pemerintah jang bersangkutan dan dari pemerintah R.I.S.

Politik pengelburan dan penggabungan itu membawa pengaruh besar tentang djalanja politik umum di dalam negri dari pemerintahan di seluruh Indonesia.

Memutuskan:

Menganjurkan kepada pemerintah supaya mengambil inisiatif untuk menjari penjelesaian atau sekurang2 nja menjusun suatu konsepsi penjelesaian bagi soal2 jang hangat jang tumbuh sebagai akibat perkembangan politik di waktu jang achir2 ini dengan tjara integral dan jang program tertentu.²⁴

Keberhasilan Natsir dalam mewacanakan mosi integral ternyata masih menyimpan cita-cita yang lebih besar yaitu bagaimana menjadikan Islam sebagai landasan atau dasar negara, perjuangan ini dilakukannya bersama Masyumi. Dalam pidatonya yang berjudul "Islam Sebagai Dasar Negara" Natsir mengatakan bahwa untuk dasar negara, Indonesia hanya mempunyai dua pilihan yaitu sekulerisme (la dinya) atau paham keagamaan (dini). Sedangkan Pancasila menurut pendapatnya adalah la dinya sebab itu Pancasila sekuler karena tidak mengakui wahyu sebagai sumber,²⁵ bisa dikatakan Pancasila adalah hasil penggalan dari masyarakat.

Masyumi memiliki peran besar dalam mempengaruhi pemikiran serta aksi politik Natsir. Sebagai tokoh bahkan sebagai ketua umum Partai, Natsir tetap harus berada pada garis tujuan partai. Masyumi yang merupakan wadah umat Islam berkeinginan untuk menjalankan syari'at Islam di Indonesia. Baik individu maupun dalam bernegara, niat ini sesuai dengan tujuan (visi-misi) Masyumi pasal II yang berbunyi (1) menegaskan kedaulatan Republik Indonesia dan agama Islam 92) melaksanakan cita-cita Islam dalam urusan kettanegaraan.²⁶ Pasal III yang berbunyi "Terlaksananya

²⁴ M. Natsir, 1954. *Capita Selecta 2*. Bandung: W. Van Hoeve. Hlm. 7

²⁵ Anonim, 1957. *Risalah Perundingan, Konstituante Republik, Indonesia, jilid V*. Tanpa kota: tanpa penerbit. Hlm. 276.

²⁶ Prawoto mangkusamito, 1951. *Memperingati Enam Tahun Masumi*. Jakarta: PT. Hikmah. Hlm. 6

ajaran dan hukum Islam di dalam kehidupan orang seorang, masyarakat, dan Negara Republik Indonesia menuju keridho'an Ilahi.²⁷

Natsir telah berusaha untuk mewujudkan tujuan dari Masyumi untuk dapat menerapkan ajaran Islam sebagai dasar segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Untuk dapat mewujudkan cita-cita partai Masyumi, Natsir berusaha menanamkan ajaran-ajaran Islam dalam segala sendi kehidupan masyarakat Indonesia dengan ikut serta dalam perjuangan ideologisasi nilai-nilai Islam kepada masyarakat Indonesia secara luas.

Agama bukanlah semata-mata ritual peribadatan dalam istilah sehari-hari seperti salat dan puasa. Sebagai suatu ideologi, agama meliputi semua kaedah-kaedah, batas-batas dalam muamalah dan hubungan sosial kemasyarakatan. Menurut Natsir, untuk menjaga supaya aturan-aturan dan patokan-patokan itu dapat berlaku dan berjalan sebagaimana mestinya, perlu adanya kekuatan dalam pergaulan hidup berupa kekuasaan dalam negara, sebagaimana telah diperingatkan oleh Rasulullah saw kepada kaum muslim bahwa sesungguhnya Allahlah pemegang dengan kekuasaan penguasa.²⁸

Maksud dari pernyataan ini yaitu seperti yang dikatakan Natsir bahwa "jang dibutuhkan oleh *djiwa* manusia, ialah suatu Agama jang Agama itu menjadikan *kriterium*, mendjadi hakim, mendjadi ukuran jang absolut, menentukan apakah sesuatunya *benar* atau *salah*.....!"²⁹ sebagai suatu agama, Islam adalah suatu ajaran dan tuntunan hidup manusia untuk menjalankan fungsi sebagai tolak ukur suatu kebenaran yang universal.

"..ia (agama) memberikan dasar jang terlepas dari relativisme. Inilah sebabnja mengapa konsepsi "humanity" jang berdasarkan atas agama, lebih logis, lebih meliputi, dan lebih memuaskan. Paham agama memberikan dasar jang tetap, harus mempunyai apa jang dinamakan point of reference, titik tempat memulangkan segala sesuatu. Djika tidak ada dasar jang tetap, maka niscaja krisis atau bentjana akan timbul".³⁰

Natsir berusaha untuk merumuskan pandangan mengenai tauhid yang menjadi asas bagi ajaran Islam. "Tauhid jang berarti pertjaya akan adanja Tuhan jang diagungkan, menjebakkan rakjat kita dalam diri masing-masing menjimpan perasaan taqwa kepada Tuhan".³¹ Pada satu sisi, ia menegaskan keesaan Allah sebagai satu-satunya Dzat yang dipertuhan oleh manusia dan menjadi titik tolak dari seorang muslim dalam memandang hidupnya. Dengan memandang hidup itu sebagai sesuatu yang berawal dari Tuhan dan kembali lagi kepada Tuhan,

²⁷ *Ibid.*

²⁸ M. Natsir, 1973. *Capita Selecta 2*. Jakarta: Bulan Bintang. Hlm. 436-437

²⁹ *Ibid.* Hlm. 30

³⁰ Anonim, 1957. *Risalah Perundingan Konstituante Republik Indonesia jilid I, "Tentang Dasar Negara Republik Indonesia dalam Konstituante"*. Tanpa kota: tanpa penerbit. Hlm. 124

³¹ *Ibid.* Hlm. 137

serta pemahaman bahwa manusia itu ada adalah hamba-hamba-Nya yang menjalani kehidupan yang sementara di dunia ini, maka tauhid membawa implikasi-implikasi besar dalam kehidupan manusia. Hanya dengan mengarahkan hidup kepada Tuhan yang transenden, maka manusia secara individu telah menjalani proses pembebasan dari belenggu hawa nafsu, menumbuhkan asas-asas etika kehidupan yang kukuh dan memerdekakan manusia dari perhambaan kepada sesama mahluk.³²

Ibadah-ibadah ini merupakan proses penyucian jiwa, yang juga berfungsi sebagai usaha untuk memperbaharui iman, memperhalus kepekaan hati nurani dan akhirnya juga sebagai upaya untuk meningkatkan kecerdasan intelektual masing-masing individu. Dengan demikian, menurut Natsir, sisi pertama dari tauhid, adalah memperkokoh kesadaran batin manusia, menumbuhkan spiritualitas yang mendalam, dan juga menjadi basis etika pribadi.³³

Sisi lain dari tauhid adalah penekanan kepada kesatuan universal umat manusia sebagai umat yang satu, berdasarkan persamaan, keadilan, kasih sayang, toleransi dan kesabaran. Artinya dalam konteks kemanusiaan, tauhid jelas-jelas menegaskan prinsip humanisme universal yang tanpa batas dimana Tuhan dengan manusia memiliki suatu perhubungan khusus yang dapat mengikat. Perhubungan rohani antara Tuhan dengan manusia bukan perhubungan kontrak antara Tuhan dan manusia yang berbunyi:

..Kalau saja berbuat baik, mesti mendapat ganjaran dan kalau saja berbuat salah, Tuhan mesti memberi hukuman. Dan bukan pula perhubungan yang berupa soal-djawab seumpama : ..Kenapa aku dibiarkan hidup sedangkan Engkau (Tuhan) tahu yang aku akan djadi pendjahat ?", atau ..Kenapa aku tidak dibiarkan hidup lebih lama supaya aku dapat berbuat baik ?, atau : ..Mengapa aku tidak dimatikan diwaktu masih kanak2 supaya aku djangan djadi orang berdosa ? !...³⁴

Konsep bahwa hidup adalah mengabdikan (memperhambakan diri) kepada Tuhan mempunyai makna substansial di dalam Islam. Ini karena paham tauhid menegaskan bahwa Tuhan tidaklah membutuhkan sesuatu dari manusia hamba-hambanya. Perhambaan diri manusia kepada Tuhan pada dasarnya adalah penundukan manusia kepada hati nuraninya yang paling dalam. Hal ini akan membawa manusia kepada kebahagiaan hidup, meskipun dari luar seseorang tampak menderita dalam perjuangannya menegakkan apa yang dianggapnya sebagai amal saleh dan ihsan itu.³⁵

Islam sebagai ideologi, Natsir sangat menekankan spiritualitas keagamaan, namun ia tetap berusaha untuk membangun kerangka pemahaman keagamaan yang lebih rasional apalagi terhadap Islam dalam hubungannya dengan masalah-masalah keduniaan. Lebih lanjut Natsir mengungkapkan "agama Islam menggembirakan pemeluknya supaya selalu berusaha mengadakan barang yang belum ada, merintis djalan yang belum ditempuh, membuat inisiatif dalam hal keduniaan yang memberi manfaat bagi masyarakat."³⁶ Dalam hal-hal keduniaan ini, Natsir mendukung paham "kebebasan" berpikir, hingga batas-batas tertentu di mana doktrin agama membenarkannya. Akan tetapi, ia menolak dengan tegas kebebasan berpikir yang tanpa batas.³⁷

Islam sebagai suatu ideologi mengandung makna bahwa manusia adalah bagian dari substansi-substansi universal yang saling terhubung dengan Tuhan sebagai Dzat pencipta (vertikal) serta dengan sesama manusia dalam hubungan sosial (horizontal). Manusia memiliki keterikatan religius dengan Tuhan untuk menjalankan aturan hidup tanpa membatasi manusia untuk berpikir dan berkembang. Ideologi Islam dianut masyarakat sebagai nilai kebaikan universal yang mengatur kehidupan masyarakat bukan hanya sebagai agama bagi para pemeluk-pemeluknya.

Islam sebagai suatu ideologi menjadi dasar bagi Natsir untuk berjuang dalam tujuan membangun bangsa Indonesia yang lebih baik terlepas dari upayanya menyikapi situasi nasional yang memanas. Natsir memerlukan kekuatan untuk dapat menyebarkan pemikirannya serta melakukan internalisasi nilai Islam sebagai perjuangan Natsir dalam proses ideologisasi Islam. Sebagai seorang politikus serta negarawan dengan ideologi Islam, Natsir memilih perjuangannya melalui jalan politik. Politik bukan sesuatu yang "kotor" tetapi suatu yang tampak "netral". "Kekotoran" ataupun "kesucian" politik adalah tergantung sejauh mana manusia yang terlibat di dalamnya mampu menjadikan asas-asas kerohanian sebagai pedoman dalam perilaku politik mereka.³⁸

Tauhid bagi Natsir menjadi tumpuan bagi pandangan "modernisme politik Islam" yang dianutnya.³⁹ Istilah modernisme politik Islam di sini diartikan sebagai suatu sikap dan pandangan yang berusaha untuk menerapkan ajaran dan nilai-nilai kerohanian, sosial dan politik Islam yang terkandung di dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi dan menyesuaikannya dengan perkembangan-perkembangan mutakhir dalam sejarah peradaban manusia.

Tauhid mengandung dua sisi, yaitu habl min Allah (hubungan manusia dengan Tuhan) dan habl min al-nas

³² Yusril Ihza Mahendra, 1994. "Modernisme Islam dan Demokrasi: Pandangan Politik Mohammad Natsir", dalam *Islamika*, No.3, Januari-Maret 1994. Hlm. 67

³³ *Ibid*

³⁴ M. Natsir. 1955. *Capita Selecta Jilid I*. Hlm. 111-112

³⁵ Dari sini, tampak Natsir berusaha untuk menghidupkan kembali pandangan sufisme tradisional

Islam yang menekankan nilai-nilai spriritualisme yang mendalam berdasarkan konsep cinta dan pengabdian kepada Tuhan. Yusril Ihza Mahendra, *Op cit*. Hlm. 68

³⁶ M. Natsir, 1955. *Op cit*. Hlm. 122

³⁷ *Ibid*

³⁸ Yusril Ihza Mahendra, *Op cit*. Hlm. 68.

³⁹ Herbert Feith & Lance Castles, 1988. *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965*, Jakarta: LP3ES. Hlm. 217

(hubungan manusia dengan manusia), maka Islam menurut Natsir, tidaklah memisahkan urusan-urusan rohaniah dengan urusan-urusan keduniaan. Sisi kerohanian akan menjadi landasan bagi segi-segi keduniaan. Artinya etika kegamaan yang bercorak universal yang ditekankan oleh ajaran Islam itu, haruslah menjadi dasar bagi kehidupan politik.⁴⁰

Berkembangnya isu sekularisasi dalam nilai-nilai Pancasila mendapat perhatian dari Natsir, dimana hal itu juga mengganggu masyarakat muslim Indonesia. Ideologisasi ini membawanya kepada penolakan terhadap ideologi Pancasila. Yang ditolak Natsir bukanlah Pancasila *an sich*, melainkan Pancasila yang di tafsirkan dan hendak di beri jiwa sekuler (la diniyyah). Pandangan Natsir terhadap Pancasila adalah yang dihubungkan dengan ajaran Qur'an, sehingga tafsir sila-silanya juga dihubungkan dengan ajaran Qur'an.⁴¹ Pendapat Soekarno yang mengatakan bahwa Pancasila merupakan pemersatu bangsa, padahal golongan komunis tidak akan menyetujui sila Ketuhanan Yang Maha Esa⁴² walaupun dalam konstituante mereka mendukung Pancasila. Natsir menambahkan bahwa Pancasila akan berarti bila dikaitkan dengan isu suatu ideologi,⁴³ tetapi karena Soekarno menempatkan Pancasila dalam kedudukan netral terhadap semua ideologi, maka Pancasila itu kosong dari isi.

Natsir berpendapat bahwa agama Islam bisa dijadikan acuan sistem kenegaraan dan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat karena agama Islam mempunyai sifat-sifat yang sempurna dan menjamin keragaman dan menghargai golongan yang ada dalam negara. Ini menjadi bisa dimengerti karena memang mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam.⁴⁴

Mananggapi ancaman sekularisasi pada dasar negara Indonesia, Natsir bersama Partai Islam Masyumi memberikan gagasannya bagi Indonesia. Partai Masyumi

yang diwakili Natsir sebagai ketua umum menawarkan gagasan Dasar Negara Islam bagi Indonesia. Natsir menekankan bahwa agama dan negara merupakan kesatuan yang tak dapat dipisahkan satu sama lain. Natsir melihat adanya signifikansi Islam untuk dijadikan dasar negara bagi negara republik Indonesia yang baru merdeka. Signifikansi Islam untuk dijadikan dasar negara, menurut Natsir, dilandasi atas beberapa hal. Pertama, Islam itu adalah agama yang lengkap dan sempurna. Namun begitu, kesempurnaan ajaran Islam itu terutama doktrin sosial politiknya hanya memberikan pedoman pedoman yang bersifat global dan tidak dalam bentuk rincian-rincian.⁴⁵ Kedua, secara sosiologis, di samping Islam merupakan agama yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia, Islam juga merupakan agama yang menghargai dan menghormati agama lain. Sebagaimana dinyatakan oleh Natsir sendiri bahwa:

"Bukan semata-mata lantaran umat Islam adalah golongan yang terbanyak di kalangan rakyat Indonesia seluruhnya, kami mengajukan Islam sebagai Dasar Negara kita, akan tetapi berdasarkan kepada kejakinan kami, bahwa ajaran-ajaran Islam yang memiliki ketatanegaraan dan masyarakat hidup itu adalah mempunyai sifat-sifat yang sempurna bagi kehidupan negara dan masyarakat dan dapat menjamin hidup keragaman atas saling harga menghargai antara pelbagai golongan di dalam negara: walaupun besar tidak akan melanda, walaupun tinggi, malah akan melindungi!"⁴⁶

Natsir mengikuti pendapat Ibn Khaldun yang membandingkan masyarakat dengan Negara; yaitu bahwa di antara keduanya seperti hubungan antara benda dengan bentuknya: yang satu bergantung kepadayang lain. Maka dari itu, kata Natsir, negara itu harus mempunyai akar yang langsung tertanam dalam masyarakat.⁴⁷ Di samping itu, masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim itu memerlukan suatu landasan yang kokoh bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Menurut para modernis Islam "Kepribadian bangsa Indonesia adalah Islam, karena agama Islam inilah agama yang kuantitatif dan kualitatif berpengaruh di Indonesia, karena Islam adalah faktor nasional Indonesia yang terpokok dan yang menguasai psycorak".⁴⁸

Menurut Natsir, dengan menjadikan Islam sebagai dasar negara diharapkan terciptanya *baladun tayyibatun wa robbun ghafur*.⁴⁹ Oleh karena itu, Natsir dengan tegas mengatakan bahwa "Pancasila itu netral dan sekuler. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara sangat kabur dan tidak bermakna apa-apa bagi umat Islam yang telah

⁴⁰ Deliar Noer, 1996. *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*. Jakarta: LP3ES. Hlm.134

⁴¹ Lukman Hakim, "Memahami Sikap Natsir Terhadap Pancasila", dalam H. Endang Saifuddin Anshari dan M. Amien Rais, "Pak Natsir 80 Tahun Buku Pertama Pandangan dan penilaian Generasi Muda", *Op cit*. Hlm. 166-169

⁴² Dalam pidato lahirnya Pancasila, 1 juli 1945, Soekarno menempatkan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam urutan terakhir. Bahkan ketika itu diperas menjadi Ekasila, yang ada tinggal gotong royong, Ketuhanan Yang Maha Esa ikut terperas dan hilang. *Ibid*.

⁴³ "Pantjasila adalah suatu perumusan dari lima tjila-kebidjakan, sebagai hasil permusjawaratan antara pemimpin2 kita dalam satu taraf perjuangannya 9 tahun yang lalu. Ia, sebagai perumusan, tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, ketjujuali kalau diisi dengan apa2 yang memang bertentangan dengan Al-Qur'an itu." Lihat Mohammad Natsir, "Apakah Pantjasila Bertentangan dengan Adjaran Al-Qur'an", dalam D.P. Sati Alimin, 1957. *Capita Selecta 2*, Djakarta: Pustaka Pendis. Hlm. 144-150

⁴⁴ Deliar Noer, *Op cit*. Hlm. 141-142

⁴⁵ M. Natsir. 1957. *Kebebasan Berbicara Lenyap, Zaman Penjajahan Kembali*. Abadi 1 Maret. Hlm. 377

⁴⁶ M. Natsir. 1959. *Islam Sebagai Ideologi*, Djakarta: Pustaka Aida. Hlm. 166

⁴⁷ M. Natsir. 1957. *Kebebasan Berbicara Lenyap, Zaman Penajahan Kembali*. *Op cit*. Hlm. 7

⁴⁸ *Harian Indonesia Raya*. "Isi Pantjasila Konkrit". Edisi 17 Desember 1957. Hlm. 1

⁴⁹ M. Natsir. 1958. "Agama dan Politik" dalam *Capita Selecta 2*. Djakarta: Pustaka Pendis. Hlm. 22, 36

memiliki suatu ideologi yang pasti, jelas dan sempurna. Karenanya, Natsir mengidealisasikan adanya negara yang berdasar Islam".⁵⁰

Agama memerlukan negara atau setidaknya pengaruh dalam negara, karena dengan negara agama dapat berkembang. Sebaliknya negara memerlukan agama, karena dengan agama negara dapat berkembang dalam bidang etika dan moral.⁵¹ Dalam pemahaman Natsir bahwa Islam merupakan ajaran yang lengkap, ajaran Islam tidak mengandung persoalan ibadah saja, tetapi juga mengandung aspek lain seperti bidang hukum dan kenegaraan.

Menurut Natsir Islam itu bukan sebagai al-din wa al-dawlah (agama dan negara) secara sekaligus seperti halnya ahli-ahli fiqh ternama seperti Imam al-Mawardi yang banyak mempengaruhi pandangan golongan tradisionalis Muslim di masa kemudian. Natsir tampaknya mengikuti pandangan Ibnu Taimiyah yang melihat "negara" sebagai sesuatu yang "perlu" bagi penegakan ajaran-ajaran agama, tetapi eksistensinya adalah hanya sebatas sebagai "alat" belaka, dan bukannya lembaga keagamaan itu sendiri.⁵²

"Negara bagi kita bukanlah tujuan, tetapi alat, urusan bernegara pada pokoknya dan pada dasarnya suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan, yang menjadi tujuan ialah kesempurnaan berlakunya undang-undang Ilahi, baik yang berhubungan dengan prikehidupan yang fana ini ataupun yang berkenaan dengan kehidupan kelak di alam baka."⁵³

Natsir berpendapat, karena negara itu hanya merupakan instrumen, bukan tujuan, maka seorang kepala negara itu tidak perlu bergelar kholifah, akan tetapi bisa juga dipergunakan nama lain, seperti amir al-mu'minin, presiden atau yang lainnya. Hal-hal penting adalah bahwa sifat-sifat, hak dan kewajiban mereka harus sebagaimana dikehendaki oleh Islam. Dengan demikian, yang menjadi syarat bagi kepala negara itu adalah agamanya, sifat dan tabiatnya, akhlak dan kecakapannya untuk memegang kekuasaan yang diberikan kepadanya dan bukan dilihat dari asal bangsa dan keturunannya ataupun semata-mata inteletnya saja.⁵⁴

Tugas utama seorang pemimpin adalah melakukan musyawarah dengan orang-orang yang dianggap patut dan pantas atau layak untuk memecahkan persoalan-persoalan umat. Sementara dalam hal-hal yang sudah ada ketentuan hukumnya, tidak perlu dimusyawahkan kembali seperti masalah alkohol, zina, perkawinan, waris, zakat dan fitrah, adalah tanggung jawab penguasa. Adapun dalam persoalan pengambilan keputusan terhadap sesuatu masalah, itu dapat diserahkan kepada

perkembangan sesuatu masyarakat, apakah seperti yang dipraktekkan oleh Abu bakar atau berdasar pada pemilihan umum secara lazim yang berlaku sekarang; yang penting musyawarah itu dilakukan.⁵⁵

Natsir tidak melihat bahwa ajaran Islam memberikan suatu bentuk atau pun struktur tertentu mengenai sebuah negara. Baginya, apa yang disediakan oleh doktrin di dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi adalah nilai-nilai dan petunjuk-petunjuk yang bersifat umum mengenai pembentukan sebuah negara. Nilai-nilai dan petunjuk yang bersifat umum itu diantaranya ialah prinsip bahwa kekuasaan di dalam sebuah negara ialah "amanah" yang mesti dilaksanakan. Prinsip bahwa kekuasaan haruslah dijalankan berdasarkan 'syura' dengan berpedoman kepada asas keadilan dan persamaan.⁵⁶

Pemikiran modernisme Natsir agaknya semakin mendorong pembentukan sebuah "negara-bangsa", tetapi tetap berdasarkan atas prinsip-prinsip Islam. Pandangan demikian, jelas berbeda dengan pandangan kaum fundamentalis yang menganggap semua orang Islam di atas dunia ini adalah "sebuah bangsa" tanpa dibatasi oleh pagar negara ras, bahasa dan warna kulit.⁵⁷

Ijtihad memang merupakan sumber dinamika internal Islam dalam menghadapi dinamika eksternal sebuah masyarakat. Masalahnya kemudian siapakah yang boleh menjalankan ijtihad? Natsir, sebagaimana tokoh-tokoh modernis yang lain, berusaha untuk melunakkan syarat-syarat ijtihad dalam urusan-urusan keduniaan, bukan saja terbatas kepada kaum alim-ulama, tetapi juga kaum intelektual dan pemimpin-pemimpin yang dipercaya oleh rakyatnya.

Pada akhirnya Natsir tidak mempunyai pilihan lain kecuali mempertemukan antara Islam dengan paham demokrasi liberal yang berkembang luas di negara-negara Eropa dan Amerika Serikat. Pandangannya mengenai demokrasi ini menunjukkan adanya perkembangan dari waktu ke waktu. Sejalan dengan keyakinannya bahwa negara pada prinsipnya adalah "alat" untuk mencapai tujuan yang dikehendaki oleh agama, dan tidak ada suatu model tertentu yang bersifat "baku" mengenai sebuah negara sebagaimana dikehendaki oleh Islam.

Dan bagi Natsir demokrasi adalah sistem yang mendekati apa yang dimaksudkan dalam Islam sebagai syura.⁵⁸ Menurut Natsir Demokrasi adalah prinsip

⁵⁵ *Ibid*

⁵⁶ Natsir mengakui bahwa Nabi tidak memerintahkan untuk mendirikan negara, dan memang, katanya, adanya negara tidak bergantung pada ada tidaknya Islam, tetapi nabi mengajarkan pedoman tertentu untuk menyelenggarakan pemerintahan agar negara menjadi kuat dan sejahtera sehingga rakyatnya mudah memperoleh tujuan hidup. Lihat dalam Deliar Noer, *Op cit.* Hlm. 135

⁵⁷ Yusril Ihza Mahendra, "Modernisme Islam dan Demokrasi: Pandangan Politik Mohammad Natsir", *Op cit.* Hlm. 69

⁵⁸ Kamaruzzaman, 2001. *Relasi Islam dan Negara: Perspektif Modernis & Fundamentalis*, Magelang: IndonesiaTera. Hlm. 73

⁵⁰ Herbert Feith dan Lance Castles, (ed)., *Indonesia Political Thinking*, Ithaca, New York: Cornell UniversitY Press. Hlm 218-219

⁵¹ Syamsuddin, M. Din. 1993. "Usaha Pencarian Konsep Negara dalam Sejarah Pemikiran Politik Islam" dalam *Ulumul Quran Volume IV Nomor 2*. Hlm. 6

⁵² Deliar Noer, *Op cit.* Hlm. 138

⁵³ M. Natsir., 1973. *Op cit.* Hlm. 402

⁵⁴ *Ibid*

pemerintahan yang sesuai dengan Islam dan realitas masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan karena demokrasi mengandung paham kedaulatan rakyat.⁵⁹ Kedaulatan tersebut berada di tangan rakyat sebagai amanah Tuhan kepada mereka. Menurut Natsir Tuhan baginya yang paling berdaulat, berdaulat diatas semua kedaulatan-kedaulatan duniawi.⁶⁰ Namun menurut Natsir pelaksanaan kedaulatan rakyat harus dilakukan dengan berpedoman kepada norma-norma syari'ah dan tidak melampaui ketentuan yang telah ditetapkan Tuhan. Berangkat dari asumsi ini, Natsir menawarkan konsep demokrasi Islam dengan menggunakan istilah Theistic democracy.⁶¹ Natsir berpendapat bahwa Islam bukan demokrasi 100%, bukan pula teokrasi 100%. Islam itu, ya Islam.⁶² Karena keputusan politik tidaklah semata-mata harus didasarkan kepada kemauan mayoritas anggota-anggota parlemen. Keputusan itu, tidak dapat melampaui hudud (batas-batas) yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Hudud yang disebutkan oleh Natsir itu bukanlah sistem penghukuman dalam hukum pidana Islam seperti ditafsirkan oleh golongan alim-ulama berpaham tradisional, melainkan "prinsip-prinsip moral universal" yang akan menjamin tegaknya nilai-nilai luhur kemanusiaan. Jadi, dia menafsirkan hudud itu hampir serupa dengan konsep "natural law" seperti dipahami Thomas Aquinas, Natsir menjamin tidak akan ada norma-norma hukum yang akan mempunyai kekuatan untuk berlaku, jika ia berlawanan dengan "natural law" sebagai norma moral yang universal.⁶³

Demokrasi yang dikehendaki oleh Islam dalam pandangan Natsir adalah hampir serupa dengan sistem demokrasi liberal, kecuali panduan dalam mengambil keputusan politik seperti dikatakan di atas, didasarkan kepada interpretasinya atas konsep ijtihad, syura' dan ijma'. Ijtihad dilihat oleh Natsir sebagai suatu keharusan mutlak bagi Islam dalam menghadapi dinamika perubahan masyarakat. Tanpa ijtihad, doktrin sebagaimana ditafsirkan serta diwariskan oleh tradisi di masa yang silam akan kehilangan relevansinya dengan problem dunia masa kini.⁶⁴ Ijma', secara tradisional diartikan sebagai "kesepakatan alim ulama fiqih tentang kualifikasi hukum dari suatu perkara yang tidak tegas penentuan hukumnya, baik di dalam al-Qur'an maupun di dalam Sunnah". Natsir melihat ijma' sebagai kesepakatan mayoritas kaum muslimin pada suatu tempat dan suatu zaman tertentu terhadap masalah- masalah bersama yang mereka hadapi dengan berpegang kepada asas-asas doktrin di dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi.⁶⁵ Konsep

ijtihad dan ijma' inilah yang kemudian jika dihubungkan dengan konsep syura al-Qur'an, dapat diwujudkan ke dalam bentuk sebuah parlemen yang anggota-anggotanya dipilih oleh seluruh rakyat.

Menurut Natsir, konsep ijtihad dan ijma, jika dihubungkan dengan konsep syura yang disebutkan dalam al-Qur'an, dapat diwujudkan kedalam bentuk sebuah parlemen yang anggota-anggotanya dipilih oleh seluruh rakyat. Mereka yang menerima amanah dari seluruh rakyat itu, dengan berpedoman kepada asas-asas doktrin, dapat membuat berbagai kebijakan berdasarkan keputusan mayoritas.⁶⁶

Pemikiran modernisme Islam yang dianut Natsir dapat dilihat memang mempunyai kesamaan- kesamaan dengan tokoh-tokoh modernisme yang lain, baik tokoh-tokoh pendahulunya seperti Tjokroaminoto dan Agus Salim, maupun tokoh-tokoh modernis Muslim di negeri lain seperti Mohammad Iqbal dan Mohammad Ali Jinnah di India (dan kemudian, Pakistan).⁶⁷

Penerapan adaptasi antara asas-asas doktrin sosial dan politik Islam dengan gagasan-gagasan modern mengenai demokrasi di negeri- negeri Barat itu sebagai suatu contoh, dapat dimengerti berbagai ucapan Natsir, bahwa "seorang Muslim tidak perlu menjadi seorang sekuler terlebih dahulu, untuk menjadi orang modern." Dia memang yakin bahwa asas-asas Islam itu, jika ditafsirkan dengan cara wajar, akan membawa kaum Muslimin kepada kemodernan tanpa harus terjerumus kepada westernisme dan sekularisme.⁶⁸

Ideologisasi yang diusung Natsir memiliki pandangan jauh kedepan dengan empat prinsip dasar yang harus ada dalam bangsa Indonesia baik dalam beragama, bermasyarakat, berbangsa, bernegara serta sesuai konsep demokrasi Islam sebagai tujuan yaitu, tauhid, persaudaraan, persamaan dan ijtihad.⁶⁹

(1) Tauhid, Natsir mengibaratkan tauhid sebagai sebilah pisau bermata dua. Pada satu sisi, ia menegaskan keesaan Allah sebagai satu-satunya zat yang dipertuhan (al-Allah) oleh manusia, dan menjadi titik tolak dari seorang muslim dalam memandang hidupnya. Sedangkan disisi kedua dari tauhid itu adalah rasa kesatuan universal umat manusia sebagai umat yang satu, berdasarkan persamaan, keadilan, kasih sayang, toleransi dan kesabaran. Dengan menetapkan tauhid sebagai

⁵⁹ Yusril Ihza Mahendra, *Op cit.* Hlm. 222

⁶⁰ Anonim. *Op cit.* Hlm. 137

⁶¹ M. Natsir, 2000. *Islam Sebagai Dasar Negara*. Jakarta: Dewan Dakwah. Hlm. 68

⁶² M. Natsir, 1973. *Capita Selecta I*. Jakarta : Bulan Bintang. Hlm. 452

⁶³ Kamaruzzaman, *Op cit.* Hlm. 71

⁶⁴ Bahtiar Efendy, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Politik Islam di Indonesia*. Jakarta: Paramadina. Hlm. 81

⁶⁵ *Ibid*

⁶⁶ *Ibid*

⁶⁷ Kamaruzaman, *Op cit.* Hlm. 67

⁶⁸ M. Natsir, "Kemalisten di Indonesia", *Op cit.* Hlm. 479

⁶⁹ M. Natsir. 1987. *Demokrasi di Bawah Hukum*. Jakarta : Media Dakwah. Hlm. 5

poros sentral kehidupan, umat Islam dapat menarik atau mendeduksi nilai-nilai etik, moral dan norma-norma pokok ajaran Islam sebagai patokan dasar bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. (2) Persaudaraan, Persaudaraan akan melahirkan sikap adil terhadap sesama manusia. Keadilan merupakan nilai-nilai kemanusiaan yang asasi dan menjadi pilar dalam berbagai aspek kehidupan, baik individu, keluarga maupun masyarakat. Negara menurut Natsir harus dibangun atas dasar keadilan. Menurut Natsir, keadilan yang dibawa oleh Islam, baik dibidang hukum, sosial maupun ekonomi adalah keadilan yang menempatkan manusia sebagai makhluk yang berdaulat dan bermartabat. (3) Persamaan, Persamaan mengandung pengertian tidak membeda-bedakan siapapun dalam mentaati undang-undang, tidak ada yang lebih tinggi dari yang lain. Sehingga, antara penguasa dan rakyat mempunyai kedudukan yang sama, tidak ada keistimewaan didepan hukum. Persamaan merupakan suatu prinsip yang tidak memandang seseorang berdasarkan pertimbangan ras, suku, silsilah maupun fanatisme. (4) Ijtihad, menurut Natsir, perumusan kebijaksanaan politik, hukum maupun ekonomi tersebut haruslah mengacu kepada asas-asas yang telah ditetapkan oleh al-Qur'an dan Sunnah Nabi atau tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip doktrin. Namun apabila petunjuk dalam mengambil keputusan itu tidak ditemukan dalam nash, maka keputusan diambil berdasarkan ijtihad, syura dan ijma. Bagi Natsir, ijtihad merupakan suatu keharusan mutlak dalam menghadapi Islam dengan dinamika perubahan masyarakat.⁷⁰

Pemikiran yang bercorak adaptif dan akulturatif terhadap kemodernan juga memiliki kelemahan dan bukan hal yang mudah dan kompromis untuk dijalankan dalam masyarakat yang beragam seperti di Indonesia. Bagi kelompok fundamentalis yang ortodok, pemikiran kaum modernis Islam sebenarnya tidak jauh berbeda dengan konsep pemikiran sekuler. Modernisme politik Islam hanyalah membungkus gagasan-gagasan politik Barat dengan baju Islam yang pada intinya tetap sekuler, dan tidak "orisinal" berasal dari Islam. Dalam satu kesempatan Natsir mengatakan bahwa Pancasila adalah pernyataan dari niat dan cita-cita kebajikan yang harus dilaksanakan dalam Negara Indonesia. Akan tetapi dalam sidang Konstituante di Bandung Natsir secara tegas menolak Pancasila sebagai dasar Negara.⁷¹

Natsir mulai dengan tegas menunjukkan sikap penolakannya terhadap Pancasila dan menawarkan Islam

sebagai ideologi negara. Sikap ini dinilai sebagai akibat berkembangnya perdebatan ideologis antara Natsir dengan Soekarno tentang penafsiran terhadap Islam dan Pancasila sebagai dasar negara. Polemik ini bermula dari terbitnya artikel Soekarno, "*Memudahkan Pengertian Islam*"⁷² yang isinya mencerminkan agar dalam Islam ada keharusan pembaharuan pemikiran dan melakukan "reorientasi ajaran-ajaran Islam". Dasar pembaharuan pemikiran ini adalah *panta rei* (semua bergerak dan mengalir mengikuti perkembangan zaman) dan rasionalisasi Islam. Menurut Soekarno, dasar pembaharuan ini melandasi setiap perubahan dalam sejarah. Ia merupakan keharusan sejarah yang pasti dialami setiap kepercayaan, ideologi, atau agama, termasuk Islam.⁷³

Soekarno selanjutnya mencoba menganalisis hubungan antara agama dan negara. Ia menulis artikel khusus mengenai masalah ini, yang berjudul "*Apa Sebab Turki Memisahkan Agama dari Negara*."⁷⁴ Dalam artikel ini Soekarno menguraikan sebab-sebab pemerintahan Kemal Attaturk memisahkan agama dari negara. Ia ingin bersikap *netral* dalam masalah ini. Pemikiran Soekarno ini menuai berbagai respon dalam kalangan kaum pergerakan, khususnya kaum nasionalis Islami dan kaum nasionalis sekuler. Kaum nasionalis sekuler tentunya memberikan dukungan terhadap pemikiran Soekarno. Tetapi di lain pihak, golongan nasionalis Islam memberikan berbagai tanggapan yang mengkritik artikel-artikel Soekarno yang sarat dengan Sekulerisme akan membawa akibat-akibat yang memprihatinkan bagi pertumbuhan dan perkembangan pemikiran serta pergerakan politik Islam di Indonesia di masa-masa mendatang.⁷⁵

Natsir merasa prihatin akan pengaruh 'negatif' tulisan-tulisan Soekarno, beberapa pemuka umat Islam seperti H. Sirajuddin Abbas, Ahmad Hassan dan Mohammad Natsir mengangkat pena menanggapi tulisan Soekarno itu. H. Sirajuddin Abbas, seorang tokoh Perti (Persatuan Tarbiyah Indonesia) menantang Soekarno dengan tulisannya, "*Memudahkan Pengertian Islam*". Sedangkan Ahmad Hassan seorang tokoh Persis (Persatuan Islam) menulis serangkaian artikel, "*Islam dan Kebangsaan*"⁷⁶ untuk menanggapi tulisan Soekarno.

Natsir sebagai tokoh pemikir Islam turut memberikan tanggapannya terhadap pemikiran Soekarno yang menitikberatkan pada rasionalisme (Sekulerisme) sebagai landasan filosofisnya. Natsir menulis artikel "*Sikap Islam Terhadap Kemerdekaan berfikir*".⁷⁷ Dalam artikelnya ini Natsir menjelaskan bagaimana sikap Islam

⁷² Soekarno, 1964. "Memudahkan Pengertian Islam", dalam *Di Bawah Bendera Revolusi*, Jakarta: panitia Di Bawah Bendera Revolusi. Hlm. 368-402

⁷³ Ahmad Suhelmi, 1999. *Soekarno Versus Natsir Kemenangan Barisan Megawati Reinkarnasi Nasionalis Sekuler*. Jakarta: Darul Falah. Hlm. 4

⁷⁴ Soekarno, *op.cit.* Hlm. 403-445.

⁷⁵ Ahmad Suhelmi, *Op cit.* Hlm. 5.

⁷⁶ *Ibid.* Hlm. 6.

⁷⁷ Ahmad Suhelmi, *Op cit.* Hlm. 6.

⁷⁰ Yusril Ihza Mahendra, *Op cit.* Hlm. 70

⁷¹ H. Munawir Sazali, MA, *Islam dan Tata Negara : Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press. Hlm. 193-195

terhadap kebebasan dan kemerdekaan akal (rasio). Kemudian dalam menanggapi artikel Soekarno yang menguraikan kasus pemisahan agama dari negara di Turki, Natsir menulis serangkaian artikel. Tulisan-tulisan Natsir ini disatukan dan diberi judul *"Persatuan Agama Dengan Negara"*. Natsir menyangkal argumen Soekarno bahwa agama harus dipisahkan dari agama. ia sejalan dengan pandangan para reformis muslim lainnya, berkeyakinan bahwa islam adalah ajaran-ajaran yang meliputi kaedah-kaedah *muamallah* (hubungan manusia dengan sesamanya) dan ibadah khusus.⁷⁸

Natsir menantang Soekarno berpolemik lebih lanjut. Bila Natsir dapat membuktikan adanya ijma ulama tentang "keharusan bersatunya agama dengan negara, apakah Soekarno mau menerima bukti tersebut, menerima bahwa dalam sejarah Islam memang ada fakta seperti itu". Pada pidato lahirnya Pancasila, 1 juli 1945, Soekarno menempatkan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam urutan terakhir. Bahkan ketika itu diperas menjadi Ekasila, yang ada tinggal gotong royong, Ketuhanan Yang Maha Esa ikut terperas dan hilang.⁷⁹

Berbeda dengan pernyataannya tentang Pancasila dan Islam 1930-an diatas, Natsir dalam pidatonya di Pakistan menyatakan dengan tegas bahwa Indonesia merupakan negara Islam, meskipun tidak disebutkan dalam konstitusi, Islam adalah agama negara. Tidak diragukan lagi Pakistan adalah negeri Islam karena telah menyatakan Islam sebagai agama negara, begitu pula Indonesia, menurutnya negara ini juga negeri Islam karena kenyataannya agama ini diakui sebagai agama rakyat, meskipun dalam konstitusi kami tidak dinyatakan dengan tegas sebagai agama negara. Tetapi Indonesia tidak mengeluarkan agama dari sistem kenegaraan, bahkan kepercayaan tauhid telah ditempatkan pada tempat teratas dari sila Pancasila, yang berfungsi sebagai dasar etik, moral dan spiritual bangsa dan negara kita.⁸⁰

Pancasila adalah formulasi lima cita-cita kebaikan sebagai hasil dari konsensus para pemimpin kita pada tahap perjuangan sembilan tahun lalu. Dan sebagai lima dasar kebaikan tidaklah bertentangan dengan A-Qur'an, kecuali apabiladimasuki oleh sesuatu yang tidak sesuai dengan Al-Qur'an. Dalam pandangan umat Islam, rumusan Pancasila tidak memperlihatkan sesuatu yang asing dalam ajaran Al-Qur'an, dan meskipun tidak identik dengan Islam itu sendiri, Pancasila telah mencakup cita-cita Islam. Kemudia ia menambahkan, Pancasila adalah manifestasi dari maksud dan cita-cita tentang kebaikan dimana kita akan melakukan setiap usaha untuk meletakkannya ke dalam praktik negara kita.⁸¹

⁷⁸ *Ibid.* Hlm. 7.

⁷⁹ *Ibid*

⁸⁰ Kamaruzaman, 2001. *Relasi Islam dan Negara: Perspektif Modernis & Fundamentalis*. Magelang: Indonesia Terra. Hlm. 66

⁸¹ Faisal Ismail, 1995. *Ideologi, Hegemoni dan Otoritas Agama : Wacana Ketegangan Kreatif Antara*

Setelah Indonesia merdeka serta Soekarno menjadi presiden yang dipilih rakyat, Natsir menerima Soekarno sebagai presiden bahkan mendukung konsep Pancasila yang diusung menjadi dasar negara Indonesia. Sebagai politikus serta pemimpin partai Islam Masyumi yang taat hukum, Natsir telah mampu menerima seutuhnya Pancasila. Namun pada perkembangannya, Pancasila telah dinilai bergeser dari jalurnya dimana hal ini dilatarbelakangi pandangan Soekarno terhadap penafsiran makna Pancasila. Pancasila yang di tafsirkan dan hendak di beri jiwa sekuler (la diniyyah). Pandangan Natsir terhadap Pancasila adalah yang dihubungkan dengan ajaran Al Qur'an, sehingga tafsir sila-silanya juga dihubungkan dengan ajaran Al Qur'an. Dalam Konstituante, Natsir melihat Pancasila sebagai ajaran atau tafsiran yang dikemukakan oleh para anggota konstituante yang sekuler.⁸²

Muncul permasalahan baru ketika Soekarno mulai mengecam sistem "demokrasi liberal" yang diimpor dari Barat dan ternyata, menurutnya tidak sesuai dengan jiwa dan kepribadian bangsa Timur. Menurut Soekarno Demokrasi Timur tidak mengenal adanya "oposisi", karena semua golongan di dalam masyarakat adalah ibarat sebuah keluarga yang *"alle leden de familie aan tafel, aan de eettafel, en aan de werktafel"* (Semua keluarga diajak menghadap meja yang sama, maka di meja makan yang sama, dan bekerja di meja kerja yang sama pula). Demokrasi seperti itu kata Soekarno adalah demokrasi bangsa Timur, yaitu demokrasi gotong royong berdasarkan prinsip kekeluargaan. Belakangan Soekarno memberi nama demokrasi terpimpin, yaitu demokrasi yang dipimpin oleh hikmah-kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.⁸³ Demokrasi Terpimpin secara tegas mempunyai dua unsur, yaitu: unsur 'demokrasi', dan unsur 'terpimpin'. Kedua unsur ini tidak boleh dipisahkan, karena keduanya merupakan unsur yang bergandengan mutlak satu sama lain. "Demokrasi" saja bisa menyeleweng ke liberalisme, dan "Terpimpin" saja bisa menyeleweng ke diktator fasis.

Demokrasi Terpimpin merupakan alat untuk mencapai cita-cita revolusi yaitu mencapai masyarakat adil dan makmur. Soekarno yang selalu mengatakan bahwa revolusi belum selesai perlu memberi arah yang jelas untuk mencapai maksud tersebut, seperti dikatakannya dalam pidato:

Sekarang roda revolusi sudah berputar kembali atas dasar hukum-hukum klasik dari semua revolusi. Apakah hukum-hukum klasik daripada revolusi itu? Satu: Tiada revolusi jikalau ia tidak menjalankan konfrontasi terus menerus. Dua: Tiada revolusi

Islam dan Pancasila, Yogyakarta: Tiara Wacana. Hlm. 72

⁸² Lihat, Lukman Hakim, *"Memahami Sikap Natsir Terhadap Pancasila"*, dalam H. Endang Saifuddin Anshari dan M. Amien Rais, *"Pak Natsir 80 Tahun Buku Pertama Pandangan dan penilaian Generasi Muda"*, *Op cit*, Hlm. 166-169

⁸³ M. Natsir, *"Islam Demokrasi. Op cit*. Hlm. 452

jikalau ia tidak berupa satu disiplin di bawah satu pimpinan.⁸⁴

Kemudian tanggal 22 April 1959, Presiden Soekarno berpidato di depan sidang Konstituante dan atas nama pemerintah menganjurkan agar supaya dalam rangka pelaksanaan Demokrasi Terpimpin, konstituante menetapkan saja UUD 1945, menjadi UUD RI yang tetap.⁸⁵ Akan tetapi usulan pemerintah tersebut ternyata ditolak.⁸⁶

Kekhawatiran terhadap kemungkinan Soekarno menjadi diktator dengan sokongan golongan komunis, yang pada akhirnya akan menguntungkan golongan yang disebutkan terakhir ini, menjadi sebab utama oposisi Natsir terhadap gagasan “demokrasi terpimpin”⁸⁷ yang dilontarkan oleh Presiden Soekarno. Natsir menentang keras gagasan demokrasi terpimpin yang dikemukakan oleh Soekarno itu, apalagi Soekarno kemudian mengemukakan niatnya untuk “membubarkan” partai-partai politik sebagai bagian integral dari aplikasi demokrasi terpimpin yang tidak mengenal oposisi itu.⁸⁸

⁸⁴ Djoehartono, 1965. *Wejangan Revolusi Bung Karno*. Jakarta: Yayasan Penyebar Pancasila. Hlm. 24.

⁸⁵ Sartono Kartodirdjo, et. all, 1975. *Sejarah Nasional Indonesia VI*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Hlm. 102

⁸⁶ Sebelum Konstituante menolak atau menerima usulan Pemerintah itu, terlebih dahulu dari blok Islam datang usul amandemen untuk menambahkan kata-kata “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” di dalam UUD 1945, akan tetapi usul tersebut tidak disetujui dalam sidang.

⁸⁷ *Demokrasi Terpimpin* dinyatakan secara resmi oleh Perdana Menteri Ir. H. Djuanda pada tanggal 19 Februari 1959. kabinet Djuanda mengambil keputusan dengan suara bulat mengenai pelaksanaan demokrasi terpimpin dalam rangka kembali ke UUD 1945. Beberapa konsekuensi dari konsep demokrasi terpimpin antara lain; pertama, penertiban peraturan menurut wajarnya kehidupan kepartaian sebagai alat perjuangan dan pelaksanaan cita-cita bangsa Indonesia dalam suatu undang-undang kepartaian rakyat Indonesia. Kedua, menyalurkan golongan fungsional, yaitu kekuatan-kekuatan potensi nasional dalam masyarakat kita, yang tumbuh dan bergerak secara dinamis, secara efektif dalam perwakilan guna kelancaran roda pemerintahan dan stabilitas politik. Ketiga, keharusan adanya system yang lebih menjamin kontinuitas dari pemerintah, yang sanggup bekerja melaksanakan programnya, yang sebagian besar dimuat dalam pembangunan alam semesta. Lihat, Ramly Hutabarat, “*Mohammad Natsir dan Demokrasi*”, dalam H. Endang Saifuddin Anshari dan M. Amien Rais, “*Pak Natsir 80 Tahun Buku Pertama Pandangan dan penilaian Generasi Muda*”, *Op cit.* Hlm. 134-135

⁸⁸ Gagasan Soekarno untuk mengubur semua partai terjadi saat kemelut politik pada akhir 1956, Soekarno berpidato di hadapan generasi muda dalam peringatan Hari Sumpah Pemuda. Lihat, Yusril Izha Mahendra, “*Prolog PRRI dan Keterlibatan Natsir-Sjafruddin*”, *Op cit.* Hlm. 150-152.

Demokrasi seharusnya menjamin kebebasan untuk mengemukakan pendapat dan menyatakan sikap tidak setuju secara terbuka dan jujur tanpa rasa takut dan khawatir. Jadi, selama ada demokrasi, selama tu pula oposisi akan tetap ada. Demokrasi dengan pengakuan kebebasan menyatakan pendapat itu menurut Natsir adalah bersifat universal. Oleh sebab itu, ia tidak melihat adanya apa yang disebut oleh Soekarno sebagai “demokrasi terpimpin” atau “demokrasi timur”, karena apa yang ada di dunia ini, menurut Natsir, hanyalah demokrasi atau bukan demokrasi. Jadi demokrasi terpimpin menurut yang tidak mengenal perbedaan pendapat dan oposisi itu adalah bukan demokrasi. Kalau demikian, kata Natsir, demokrasi terpimpin tidak lain adalah sistem diktator.⁸⁹

Perjuangan mengaplikasikan Islam sebagai dasar negara tidak semudah perjuangan mosi integral, persoalan dasar negara harus Islam, Pancasila atau lainnya mengalami perdebatan panjang di konstituante sejak November 1956 sampai dengan Juni 1959 akhir dari perdebatan ini tanggal 2 Juni 1959 tanpa adanya satu keputusan. Pihak pemerintah membaca situasi ini sebagai suatu kemacetan konstitusi yang serius, maka pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Soekarno dengan sokongan penuh pihak militer mengeluarkan dekrit untuk kembali ke UUD 1945 dan sekaligus membubarkan Majelis Konstituante yang dipilih rakyat.⁹⁰ Situasi tersebut tentu menjadikan suatu guncangan tersendiri bagi umat Islam baik secara politis maupun secara psikologis. Berikut adalah isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang dimuat dalam harian *Indonesia Raya* tanggal 6 Juli 1959:

“Kami Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi Angkatan Perang, Menetapkan pembubaran Konstituante, Menetapkan Undang-undang Dasar 1945 berlaku lagi bagi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, terhitung mulai hari tanggal penetapan Dekrit ini, dan tidak berlakunja lagi Undang2 Sementara.

Pembentukan Madjelis permusjawaratan Rakjat Sementara, yang terdiri atas Anggota2 Dewan Perwakilan Rakjat ditambah dengan utusan-utusan dari daerah2 dan golongan2, serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara, akan diselenggarakan dalam waktu yang sesingkat2nja”.⁹¹

Pada tanggal 31 Desember 1959 Soekarno menetapkan kebijakan Penetapan Presiden (Penpres) No. 7/ 1959 yang mengatur kehidupan dan pembubaran partai, selanjutnya dikeluarkan pula Keputusan Presiden

⁸⁹ Yusril Izha Mahendra, 1994. “*Modernisme Islam dan Demokrasi: Pandangan Politik Mohammad Natsir*”, dalam *Islamika*, No.3, Januari-Maret 1994. Hlm 72

⁹⁰ Thohir Luth. 1999. *M. Natsir Dakwah dan Pemikirannya*. Jakarta: Gema Insan Press Mulkan, Abdul Munir, 1996. *Ideologisasi Gerakan Dakwah Episod Kehidupan M.Natsir dan Azhar Basyir*. Yogyakarta: Sypress Hlm.

⁹¹ *Harian Indonesia Raya*. “Undang2 Dasar-1945 Ditetapkan Berlaku Lagi”. edisi 6 Djuli 1959. Hlm 1

(Kepres) No. 200/ 1960 yang diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1960 dan pada 13 September 1960, Pimpinan Partai Masyumi menyatakan partainya bubar untuk memenuhi ketentuan-ketentuan dalam keputusan presiden.⁹²

Sebagai seorang pemikir yang aktif menulis, Natsir banyak pula menyampaikan gagasan-gagasan dan pemikirannya melalui tulisan. Selain tulisan dalam surat kabar, banyak karya Natsir yang diterbitkan. Karya-karya tulisan Natsir tersebut antara lain: *Kom tot het Gebed* (1931), *Muhammad als Profeet* (1931), *Gouden Regels Uit Den Qur'an* (1933), *De Islamietische Vrouw en haar Recht* (1933), *Het Vasten* (1934), *Cultuur Islam* (1936), karya bersama Prof. C.P. Wolff Kemal Schoemaker, *Hidup Bahagia* (1951), *Bertentangankah Pancasila Dengan Al Qur'an?* (1954), *Operasi Jiwa, Memecahkan Soal Kemananan, Capita Seleta I dan II* (1955), *Islam dan Kristen di Indonesia* (1969), *Dibawah Naungan Risalah* (1971), *World of Islam Festival Dalam Perspektif Sejarah* (1977), *Pandai-pandailah Bersyukur Ni'mat* (1980), *Kumpulan Khutbah Hari Raya* (1980), *Fiqhud Da'wah* (1981), *Azas Keyakinan Agama Kami (DDII-Jakarta)*, *Soal Palestina Dan Umat Islam* (1981), *Aqidah dan Fikiran-fikiran Dasar manusia, Resep Keluarga bahagia* (1981), *Dunia Islam Dari Masa ke masa* (1982), *Selamatkan Demokrasi Berdasarkan Jiwa Proklamasi Dan UUD 1945: Karya bersama S. Harjadinata dan Jenderal A.H. Nasution* (1984), DII⁹³

PENUTUP

Latar belakang pemikiran ideologi Islam Mohammad Natsir dimulai dari kehidupan di lingkungan masyarakat Islam Minang, pendidikan dasar di sekolah Islam hingga memasuki dunia politik nasional. Kematangan ideologi Islamnya semakin kuat ketika Natsir masuk dalam Masyumi. Pada saat itu Soekarno banyak mengobarkan pemisahan negara dengan agama sementara Soekarno sendiri sebagai seorang muslim menurut para tokoh Islam adalah seorang yang menggampangkan agama. Selanjutnya Soekarno mulai mengkritik pelaksanaan demokrasi parlementer yang berjalan di Indonesia. Soekarno memiliki gagasan tentang demokrasi terpimpin yang memusatkan pemerintahan pada dirinya sebagai presiden dan menghapuskan sistem partai.

Menanggapi situasi itu, Natsir dengan berlandaskan ideologi Islamnya merumuskan konsep ideologisasi Islam di Indonesia. Konsep ideologisasi Islam yang dimaksud disini adalah internalisasi nilai-nilai ke-Islaman dalam kehidupan individu, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara rakyat Indonesia. Natsir menyusun penyelenggaraan pemerintahan dan penentuan keputusan sesuai ajaran Islam yaitu melalui proses ijtihad, ijma' dan syura. Proses ini sesuai dengan ajaran Islam dalam mengambil keputusan sehingga keputusan yang diambil

tidak menyeleweng dari garis batas yang ditentukan baik oleh Al Qur'an, sunnah nabi maupun konstitusi. Natsir merumuskan nilai-nilai Islam untuk ditanamkan dalam masyarakat Indonesia berupa nilai Tauhid, Persaudaraan, Persamaan dan Ijtihad. Untuk menjalankan konsepnya, Natsir mengambil jalan legal formal yaitu melalui tulisan, pidato dan melalui perdebatan dalam sidang konstituante 1957-1959. Pergerakan Natsir berakhir setelah keluarnya dekrit presiden 5 Juli 1959. Kemudian keluarnya Keppres No. 200 Tahun 1960 tentang pembubaran partai dan pada 13 September 1960 Partai Masyumi menyatakan pembubaran partai untuk memenuhi ketentuan-ketentuan presiden.

Pemikiran Natsir tentang ideologisasi Islam secara teoritis dapat dijabarkan terstruktur dan sistematis, namun dalam aksi-aksi politiknya kadang ia tidak dapat lepas dari idealisme kepentingan pribadinya sebagai pelaku politik. Dalam situasi ini terlihat adanya dinamika dalam pemikiran Natsir dalam penjabaran gagasannya melalui aksi-aksi praktis dalam politik nasional. Natsir pada awalnya sebagai seorang politikus Islam telah menerima Pancasila sebagai penjabaran dari nilai Islam yang shahih dan sesuai dengan ajaran Islam. Namun dalam perkembangannya, Natsir terutama dalam sidang konstituante menunjukkan sikap menolak Pancasila sebagai dasar negara karena nilai-nilai Pancasila dianggapnya melenceng dari ajaran Islam dan merupakan bentuk manifestasi nilai sekuler.

Pemikiran Natsir yang bercorak adaptif dan akulturatif terhadap kemodernan juga memiliki kelemahan dan bukan hal yang mudah dan kompromis untuk dijalankan dalam masyarakat yang beragam seperti di Indonesia. Bagi kelompok fundamentalis yang ortodok, pemikiran kaum modernis Islam sebenarnya tidak jauh berbeda dengan konsep pemikiran sekuler. Modernisme politik Islam hanyalah membungkus gagasan-gagasan politik Barat dengan baju Islam yang pada intinya tetap sekuler, dan tidak "orisinal" berasal dari Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Arsip

- Anonim, 1957. *"Tentang Dasar Negara Republik Indonesia dalam Konstituante"* jilid I. Tanpa kota: tanpa penerbit
- , 1957. *Risalah Perundingan Konstituante Republik Indonesia jilid V*. Tanpa kota: tanpa penerbit

Koran

- Harian Indonesia Raya*. "Isi Pantjasila Konkrit". Edisi 17 Desember 1957
- Harian Indonesia Raya*. "Undang2 Dasar-1945 Ditetapkan Berlaku Lagi". Edisi 6 Djuji 1959

Buku

- Anshari, Endang Saifuddin dan M. Amien Rais, 1988. "Pak Natsir 80 Tahun Buku Pertama Pandangan dan penilaian Generasi Muda". Jakarta: Media Dakwah
- Djoehartono, 1965. *Wejangan Revolusi Bung Karno*. Jakarta: Yayasan Penyebar Pancasila

⁹² Ahmad Syafii Maarif, 1985. *Islam Indonesia dalam Perspektif Sejarah Kontemporer, dalam penulisan Sejarah Islam di Indonesia* dalam sorotan, Muin Umaq ed. Yogyakarta: Dua Dimensi, 1985. Hlm 75

⁹³ Solichin Salam. 1990. *Wajah-wajah Nasional*. Jakarta: Pusat Studi dan Penelitian Islam.

- Efendi, Bahtiar. *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Politik Islam di Indonesia*. Jakarta: Paramadina
- Feith, Herbert & Lance Castles, 1988. *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965*, Jakarta: LP3ES
- Hakim, Lukman, "Memahami Sikap Natsir Terhadap Pancasila", dalam H. Endang Saifuddin Anshari dan M. Amien Rais, 1988. "Pak Natsir 80 Tahun Buku Pertama Pandangan dan penilaian Generasi Muda". Jakarta: Media Dakwah
- Iskandar Z dkk, 2004. *Dinamika Ilmu Jurnal Kependidikan*. Samarinda: STAIN Samarinda
- Ismail, Faisal. 1995. *Ideologi, Hegemoni dan Otoritas Agama : Wacana Ketegangan Kreatif Antara Islam dan Pancasila*, Yogyakarta: Tiara Wacana
- Kamaruzzaman, 2001. *Relasi Islam dan Negara: Perspektif Modernis & Fundamental* Magelang: IndonesiaTera,
- Sartono Kartodirdjo, et. all, 1975. *Sejarah Nasional Indonesia VI*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
- Kasdi, Aminuddin .2005. *Memahami Sejarah* . Surabaya : Unesa University Press
- Luthh, Thohir, 1999. *M. Natsir Dakwah dan Pemikirannya*. Jakarta: Gema Insan Press Mulkan, Abdul Munir, 1996. *Ideologisasi Gerakan Dakwah Episod Kehidupan M.Natsir dan Azhar Basyir*. Yogyakarta: Sipsess
- Ma'arif, Ahmad Syafi'i. 1985. *Studi Tentang Percaturan dalam Konstituante Islam dan Masalah Kenegaraan*. Jakarta : LP2ES
- Mahfud M.D, Moh. 1993. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, Studi Tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Kenegaraan*. Jakarta : Rineka Cipta
- Mahendra, Yusril Ihza, "Modernisme Islam dan Demokrasi: Pandangan Politik Mohammad Natsir", dalam *Islamika*, No.3, Januari-Maret 1994
- Mangkusasmito, Prawoto, 1951. *Memperingati Enam Tahun Masumi*. Jakarta: PT. Hikmah.
- Murti, Sri, 1996. "Natsir: Politikus Intelektual Muslim", Skripsi Fakultas Adab jurusan Sejarah dan Perdaban Islam.
- Mulkan, Abdul Munir, 1994. *Runtuhnya Mitos Politik Santri: Strategi Kebudayaan Dalam Islam*. Yogyakarta: Sipsess
- Nata, Abuddin, 2005. *Tokoh-tokoh Pembaruan Pendidikan di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Natsir, M., 1954. *Capita Selecta 2*. Bandung: W. Van Hoeve
- , "Apakah Pantjasila Bertentangan dengan Ajaran Al-Qur'an", dalam D.P. Sati Alimin, 1957. *Capita Selecta 2*, Djakarta: Pustaka Pendis
- , 1957. *Kebebasan Berbicara Lenyap, Zaman Peniajahan Kembali*. Abadi 1 Maret
- , 1958. "Agama dan Politik" dalam *Capita Selecta II*. Djakarta: Pustaka Pendis
- , 1959. *Islam Sebagai Ideologi*, Djakarta: Pustaka Aida
- , 1970. *The Danger of Secularism*, dalam Herbert Feith dan Lance Castles, (ed)., *Indonesia Political Thinking*, Ithaca, New York: Cornell University Press
- , 1973. *Capita Selecta I*. Jakarta : Bulan Bintang
- , 1973. *Capita Selecta 2*, Jakarta: Bulan Bintang
- , 1987. *Demokrasi di Bawah Hukum*. Jakarta : Media Dakwah
- , 1988. *Toleransi dalam Islam*, dalam Herbert Feith & Lance Castles, *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965*, Jakarta: LP3ES
- , 2000. *Islam Sebagai Dasar Negara*. Jakarta: Dewan Dakwah
- Noer, Deliar, 1987. *Partai Islam di Pentas Nasional*. cet. Ke-1. Jakarta: Grafiti Press
- , 1996. *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*. Jakarta: LP3ES
- Notosusanto, Nugroho. 1978. *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer*. Jakarta: Idayu Press
- Puar, Yusuf A., 1978. *M. Natsir 70 Tahun Kenang – Kenangan Kehidupan dan Perjuangan*. Jakarta : Antara
- Salam, Solichin, 1990. *Wajah-wajah Nasional*. Jakarta : Pusat Studi Dan Penelitian Islam
- Sazali, H. Munawir, MA, *Islam dan Tata Negara : Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press
- Soekarno, 1964. "Memudahkan Pengertian Islam", dalam *Di Bawah Bendera Revolusi*, Jakarta: panitia Di Bawah Bendera Revolusi
- Suhelmi, Ahmad, 1999. *Soekarno Versus Natsir Kemenangan Barisan Megawati Reinkarnasi Nasionalis Sekuler*. Jakarta: Darul Falah
- Syamsuddin, M. Din. 1993. "Usaha Pencarian Konsep Negara dalam Sejarah Pemikiran Politik Islam" dalam *Ulumul Quran Volume IV Nomor 2*
- Taisir, Muhammad, 1999. "Konsep Kenegaraan Dalam Islam Menurut Mohammad Natsir" Skripsi Fakultas Adab, jurusan Sejarah dan Perdaban Islam.